



## **ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS KOMPONEN PAD TERHADAP APBD di D.I YOGYAKARTA**

### ***CONTRIBUTION ANALYSIS AND EFFECTIVENESS OF PAD COMPONENTS TO APBD IN D.I YOGYAKARTA***

DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i1.2300>

**Yustirania Septiani<sup>1</sup>, Fitrah Sari Islami<sup>2</sup>✉, Jurni Hayati<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Tidar, Universitas Amikom Yogya

✉ [fitrahsari@untidar.ac.id](mailto:fitrahsari@untidar.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan suatu daerah otonom dalam pembangunannya untuk merealisasikan target yang dilihat melalui APBD. Serta mengukur efektivitas terkait tingkat keberhasilan dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Data yang digunakan berupa data sekunder. Waktu penelitian tahun 2010-2016. Daerah penelitian merupakan daerah kabupaten kota di D.I Yogyakarta sejumlah 5 daerah. Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan rasio kontribusi dan rasio efektifitas. Hasil yang diperoleh kontribusi kabupaten kota di D.I Yogyakarta masih dikatakan kurang. Sedangkan kondisi keefektivasnya dilihat dari pencapaian realisasi rata-rata kabupaten kota di D.I Yogyakarta sudah dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan berjalan secara fluktuatif dari tahun ke tahunnya sehingga dapat dikatakan sangat efektif.

**Kata kunci:** Kontribusi, Efektivitas, PAD, APBD

#### **Abstract**

*This study aims to see the ability of an autonomous region in its development to realize the targets seen through APBD As well as measuring effectiveness related to the level of success in an effort to achieve goals and objectives which is the relationship between output and goals. The data used in the form of secondary data. Research time in 2010-2016. The research area is a city district area in D.I Yogyakarta in a number of 5 regions. The research method used by using the ratio of contribution and the ratio of effectiveness. The results obtained by the contribution of urban districts in D.I Yogyakarta is still said to be lacking. While the condition of its effectiveness can be seen from the achievement of the average realization of the city districts in Yogyakarta D.I has been able to exceed the targets set and run fluctuatively from year to year so that it can be said to be very effective.*

**Keywords:** Contribution, Effectiveness, PAD, APBD

## **PENDAHULUAN**

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah (Nadir, 2013).

Sedangkan menurut istilah otonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *autos* (sendiri), *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Sehingga kata otonomi berarti sebuah peraturan atau undang-undang yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan untuk digunakan dalam pembiayaan rutin serta pembangunan di suatu daerah otonom (Adawiyah & Kusuma, 2015).

Menurut Pasal 157 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun ekonomi wilayahnya tergantung pada kemampuan aparturnya untuk dapat memobilisasi potensi yang ada pada masyarakatnya melalui optimalisasi peningkatan PAD.

Baik di negara maju maupun negara berkembang, pemerintah daerah dilembagakan sebagai saluran untuk memastikan pemberian layanan yang efektif.

Sehingga kemampuan otoritas lokal akan berbeda dari satu negara ke negara tetapi dalam semua kasus, wewenang mencakup pengadaan jenis barang tertentu dan layanan yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang menjadi tanggung jawab mereka (Jones, 2007).

Indonesia dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan menyatakan juga bahwa dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukuran, salah satunya adalah dengan mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Penciptaan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daerah akan meningkatkan kuantitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dan penciptaan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Sumber keuangan harus tergali dan dikelola serta digunakan secara efisien dan efektif. Sehingga akan menurunkan ketergantungan akan bantuan pemerintah (Batik, 2013).

Belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatannya, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat

sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan APBD dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu harus didukung dengan akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah. Sehingga diharapkan kontribusi dalam pemberian layanan akan berfungsi dengan baik. Kondisi ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan masyarakat. Sehingga pemangku kebijakan akan bertanggung jawab dengan apapun yang mereka telah lakukan (Basheka, 2008)

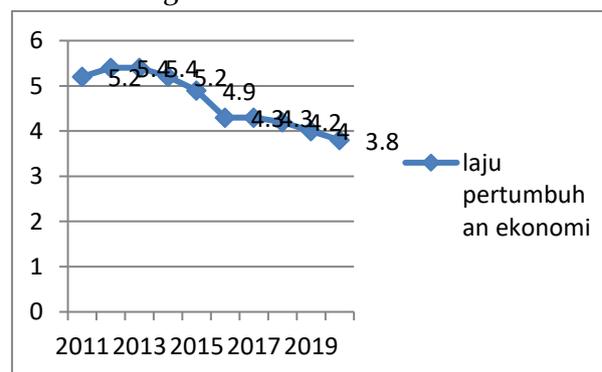
Namun demikian, sebagaimana selalu terjadi dalam pengelolaan keuangan publik, selalu terjadi kendala penganggaran (*budget constraint*), yang tercermin dari banyaknya kebutuhan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, prioritas belanja dan perencanaan yang baik dapat menjadi kunci untuk menyasiasi kendala penganggaran. Terkait dengan hal tersebut, secara nasional kiranya perlu dilakukan analisis tentang kesehatan keuangan APBD yang mampu memberikan informasi yang berguna dalam memotret kondisi keuangan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD

yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukuran, salah satunya adalah dengan mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Adawiyah & Kusuma, 2015)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) ini menurut Agus Joko Pitoyo PSKK UGM yang dikutip dari (N. G. Indonesia, 2015) merupakan akses terhadap ekonomi, kesehatan, pendidikan sehingga akan terjadi keberlangsungan terhadap pembangunan berkelanjutan, pemihakan kepada rakyat. Salah satu alat ukur nya yakni presentase Anggaran Pendapat Belanja Daerah bagi Pendidikan dan Kesehatan. Dan Presentase tertinggi APBD pendidikan dimiliki oleh D. I Yogyakarta dengan nilai 45,63. Hasil pengukuran IPBK menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi sangat berperan disini. D.I Yogyakarta sendiri merupakan provinsi dengan peringkat IPM no 2 di Indonesia.

Namun dalam laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2015 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta tahun 2016-2020 justru menunjukkan kecenderungan menurun.



Sumber: BPS (diolah)

**Gambar 1.** Laju pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta

Badan pusat statistik melansir bahwa D.I Yogyakarta sebagai provinsi yang

memiliki ketimpangan tertinggi di Indonesia. Tercatat per september 2016, rasio gini D.I Yogyakarta yang menceerminkan ketimpangan pengeluaran masyarakat mencapai 0,425 (BAPEDA, 2018).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) Melihat dan menganalisis seberapa besar kontribusi komponen-komponen PAD terhadap APBD di D.I Yogyakarta, (2) Melihat dan mengkaji seberapa besar efektifitas komponen-komponen PAD terhadap APBD D.I Yogyakarta

Penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Komponen Pad Terhadap Apbd Di D.I Yogyakarta” memiliki dua manfaat yaitu: (1) Setelah mengetahui kondisi kontribusi yang terjadi akan terlihat apakah menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, (2) Setelah diketahui kemudian melihat secara Analisis Efektifitas untuk melihata ketepatan target anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang ada pada anggaran. Kondisi ini bisa dijadikan acuan seberapa besar pemerintah darah mampu membuat konsep anggaran yang realistis

## **LANDASAN TEORI**

### ***Otonomi Daerah***

Secara umum Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai titik awal pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintahan pusat menyerahkan sebagian

kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat. Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkeeseimbangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber yang ada di daerahnya masing-masing. Secara sederhana Manwood dalam Djoko (2003) mendefinisikan otonomi daerah sebagai *a freedom which is assumed by a local government in both making and implementing its own decisions*. Otonomi merupakan dasar dari sistem ketatanegaraan kita dalam menyusun dan memberi isi kepada daerah (Nasroen (Gie, 1994).

Pemberian otonomi yang luas dandesentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Risyanto, 2013). Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan

tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah.

### ***Pendapatan Asli Daerah***

Menurut (Bastian Indara, 2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah. Rumus untuk menghitung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:  
**PAD = Pajak daerah +Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lainlain PAD yang sah.**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku . Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha

aerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terbagi atas 4 yakni : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah***

Salah satu bentuk dari anggaran organisasi sektor publik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun salah satu fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu untuk menjadi dasar dalam merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Karena jika tidak dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah"

APBD adalah suatu anggaran daerah. Yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

1. rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. periode anggaran yang biasanya satu tahun.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 , Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

### **Kontribusi PAD terhadap APBD**

Salah satu penerimaan Pemerintah Kota/Kabupaten yang tercermin dalam APBD Pemerintah Kota/Kabupaten berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal apabila setiap tingkat pemerintahan daerah independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam system pemerintah daerah.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah jika keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya

untuk mendapatkan penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

Pendapatan asli daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah, dapat digunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio pendapatan daerah terhadap total pendapata daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal tersebut maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam pendanaan tugas daerah.

### **Konsep Efektifitas**

Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah(Astuti, 2015).

Penilaian efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata "efektif" berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien

yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, ruang atau benda .

Efektifitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan (Indrawijaya, 2010). Efektifitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran. Efektifitas suatu organisasi tergantung kepada seberapa jauh ia mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sarasannya (Richard M, Steers, 1985). Keempat pandangan ini, menitikberatkan pengukuran efektivitas organisasi pada seberapa besar organisasi mencapai tujuan atau sarasannya.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Rondonuwu, Tinangon, & Budiarmo, 2015). Konsep efektivitas biasanya selalu terkait dengan konsep efisiensi, yaitu suatu proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi yang menunjukkan banyaknya input atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu,

efisiensi dapat diukur sebagai Ratio input terhadap output.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat panel, yaitu data yang diperoleh dari 5 daerah di D.I Yogyakarta dari tahun 2010-2016. Data diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti materi penelitian, data dari BPS, BAPPEDA, Statistik Daerah serta data-data yang bersifat publikasi dari tahun 2010-2016. Data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka (*library observation*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap APBD tiap tahun. Sedangkan rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan target komponen PAD.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat tabel target dan realisasi masing-masing komponen PAD
2. Menyusun tabel analisis kontribusi masing-masing komponen PAD

Untuk mengetahui besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan masing-masing komponen PAD terhadap APBD di D.I Yogyakarta dapat menggunakan rumus:

$$P_n = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Keterangan :

$P_n$  = Kontribusi penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah)

$QY$  = Jumlah penerimaan APBD (Rupiah)

$QX$  = Jumlah Komponen penerimaan PAD (Rupiah)

$n$  = tahun (periode) tertentu

Untuk menilai besarnya kontribusi komponen PAD terhadap APBD dapat diinterpretasikan pada kriteria yang dikeluarkan oleh Litbang Depdagri Fisipol UGM sebagai berikut:

**Tabel 1.** Interpretasi Nilai Kontribusi

Kriteria	Rasio Kontribusi (%)
Sangat kurang	0.00 – 10.00
Kurang	10.00 – 20.00
Sedang	20.10 – 30.00
Cukup	30.10 – 40.00
Baik	40.10 – 50.00
Sangat Baik	>50.00

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991, Ghazali Syamni, 2009

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu kegiatan, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Rumus pengukuran efektivitas untuk penerimaan sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{(\text{realisasi Komponen PAD})}{(\text{Target komponen PAD})}$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti dibawah ini:

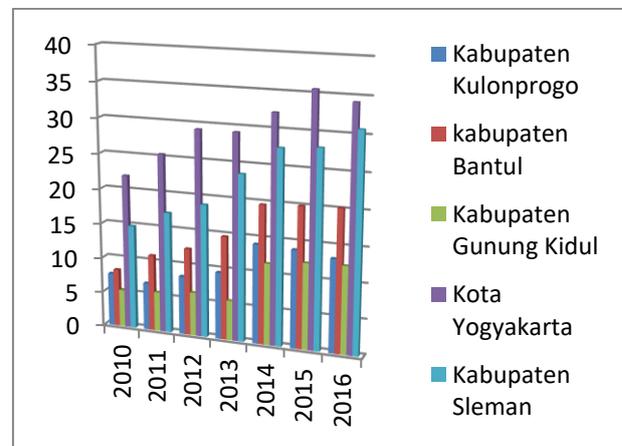
**Tabel 2.** Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<= 60

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, Ghazali Syamni, 2009

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi di Kabupaten Kota D.I Yogyakarta memperlihatkan kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata masih sangat kurang hal ini dilihat dari nilai kontribusi yang masih dibawah 20%. Sesuai kriteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991, Ghazali Syamni, 2009 rasio kontribusi tersebut dikatakan kurang.



Sumber: data diolah

**Gambar 2.** perbandingan Kontribusi PAD terhadap APBD antar Kabupaten Kota D.I Yogyakarta

Analisis Efektivitas memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan yang bersumber dari komponen PAD terhadap target penerimaan dari pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Kota D.I

Yogyakarta menunjukkan hasil dimana pencapaian realisasi rata-rata dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan berjalan secara fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Sesuai Depdagri, Kepmendagri No.

690.900.327 tahun 1996, Ghazali Syamni, 2009 memperlihatkan kriteria rasio efektifitas tersebut yakni sangat efektif.

**Tabel 3.** Rata-rata Efektivitas Komponen PAD terhadap APBD

Komponen PAD	Kulonprogo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
pajak daerah	1,10	1,34	1,14	1,25	1,15
retribusi daerah	0,87	0,93	1,15	1,17	1,16
hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,00	1,07	1,11	1,07	1,05
lain lain PAD yang sah	1,43	1,80	1,44	1,37	1,27

Sumber: data diolah.

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengujian terhadap kontribusi memperlihatkan bahwa masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dari Kabupaten dan Kota D.I Yogyakarta, kemudian pengujian terhadap efektivitas memperlihatkan tingkat efektifitasnya tinggi yang berarti realisasi melebihi target yang direncanakan.

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama, Pemerintah daerah baik Kabupaten Kota di D.I Yogyakarta hendaknya saling bekerja sama untuk dapat lebih meningkatkan pelaksanaan target anggaran penerimaan daerah, kedua untuk penelitian selanjutnya, supaya menambah rantang wktu data penelitian dari sebelum otonomi daerah sebagai pembanding dan setelah otonomi daerah sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat.

### DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, W., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah

Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal AKUNIDA*, 1(1), 17–26.

Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Ebbank*, 6(1), 1–18.

BAPEDA. (2018). *Analisi Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta* (T. B. DIY, Ed.).

Basheka, B. C. (2008). *Procurement Planning And Accountability of Local Government Procurement Systems In Developing Countries: Evidece From Uganda*. 8(3), 379–406.

Bastian Indara. (2002). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* (pertama). Yogyakarta: BPFU UGM.

Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD di Kabupaten Lomnok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 115–140.

Gie, T. L. (1994). *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Indonesia, N. G. (2015). Daerah Istimewa Yogyakarta Peringkat Pertama dalam Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Retrieved October 10, 2019, from <https://nationalgeographic.grid.id/read/>

13302050/daerah-istimewa-yogyakarta-  
peringkat-pertama-dalam-indeks-  
pembangunan-berwawasan-  
kependudukan

- Indonesia, P. R. *Pemerintahan Daerah.* , (1999).
- Indonesia, P. R. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.* , (2004).
- Indonesia, R. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* , (2006).
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi.* Bandung: Refika Aditama:
- Jones, D. S. (2007). *Public Procurement In Southeast Asia: Challenge and Reform.* 7(1), 3-33.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa *Jurnal Politik Profetik* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1)..
- Risyanto, H. (2013). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Anggaran 2004-2013. *Coopetition*, 6(33), 21-33.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(4), 23-32.